

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai “penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, mematuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka”.

Istilah *Good and Clean Governance* merupakan wacana baru dalam kosa kata ilmu politik yang muncul pada awal 1990-an. Secara umum istilah *Good and Governance* memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan politik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian *Good Governance* tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat) dengan istilah *Good Coporate*.

Lahirnya wacana *Good Governance* berakar dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada praktik pemerintahan, seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Penyelenggaraan urusan publik yang bersifat sentralistis, non-partisipatif serta tidak akomodatif terhadap kepentingan publik, telah menumbuhkan rasa tidak percaya dan bahkan antipati kepada rezim pemerintahan yang ada. Masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Beragam kekecewaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut pada akhirnya melahirkan tuntutan untuk mengembalikan fungsi-fungsi pemerintahan yang ideal. *Good*

Governance tampil sebagai upaya untuk memuaskan dahaga publik atas kinerja birokrasi yang sesungguhnya.¹

Dalam suatu pemerintahan, humas pemerintahan sangat berbeda dengan humas yang bukan pemerintahan. Humas pemerintahan tidaklah mempunyai suatu yang di perdagangkan, walaupun demikian humas pemerintahan juga senantiasa menggunakan teknik strategi yang dilakukan bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan daerah.²

Asal mula hubungan masyarakat (humas) sebenarnya dapat dilacak kembali pada permulaan peradaban manusia. Unsur-unsur dasarnya memberi informasi kepada masyarakat, membujuk masyarakat, dan mengintegrasikan masyarakat adalah landasan bagi masyarakat zaman dulu yang juga sama bagi masyarakat sekarang.³

Dasar-dasar fungsi humas kini telah terlihat dalam revolusi Amerika, yang saat ini belum merupakan kemunculan yang populer dan spontan, tetapi merupakan suatu gerakan yang direncanakan dan dilaksanakan.⁴

Seorang humas mampu bertindak sebagai pemberi data dan informasi untuk mencegah adanya kesalahan informasi, hubungan masyarakat yang baik dalam upaya penyebarluasan atau mempublikasikan kegiatan dan program kerja unit kehumasan yang ditujukan kepada *public internal* ataupun masyarakat umumnya⁵ merumuskan tiga kegiatan utama humas, yaitu :

1. Memberikan penerangan kepada masyarakat

¹ <http://agbsosek.blogspot.co.id/2016/04/pengertian-latar-belakang-prinsip-dan.html>
(diakses pada tanggal 25 Maret 2018)

² S Nurzannah, "Kontibusi Humas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau Dalam Mepromosikan Event Pacu Jalur, *Tempo*, 18 Oktober 2017

³ H. Frazier Moore. *Humas : Membangun Citra Dengan Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005) Hlm 23

⁴ H. Frazier Moore, *Ibid*, hlm 24

⁵ S Nurzannah, "Kontibusi Humas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau Dalam Mepromosikan Event Pacu Jalur, *Tempo*, 18 Oktober 2017

2. Melakukan persuasi untuk merubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung dan berupaya untuk mengintegrasikan sikap
3. Perbuatan masyarakat suatu lembaga dengan sikap dan perbuatan suatu lembaga dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya.

Kerja humas antara lain membuat dan menyajikan konten tentang aktivitas sebuah organisasi pada pabrik. Karena itu humas merupakan sebuah seni untuk membuat sesuatu menjadi tenar. Tidak hanya itu, humas selalu berusaha untuk membangun persepsi atau sikap *public* yang selalu positif terhadap perusahaan.

Begitu juga dengan humas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menjalankan tugasnya sebagai penghubung baik antara pihak perusahaan dengan masyarakat, yang mana salah satu program dari kehumasan yaitu melaksanakan kegiatan *good governance*.

Kegiatan ini tidak melakukan observasi, namun langsung mendatangi pihak humas sendiri dan melakukan wawancara kepada Humas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 20 November 2017. Dimana dalam melaksanakan program ini masih ada hambatan-hambatan dalam melaksanakan kegiatan *good governance* tersebut. Dampak yang ditimbulkan adalah belum tercapainya keseluruhan kegiatan *good governance* ini di Kabupaten Kuantan Singingi.

Kurangnya infrastruktur untuk bisa mencapai keberhasilan *good governance* di Kabupaten Kuantan Singingi. Karena fasilitas yang digunakan kurang mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan *good governance* tersebut. Misalnya daerah-daerah yang jangkauannya dari Pusat Kota Teluk Kuantan, sehingga susah untuk menelusurinya. Selain itu hambatan dari segi jaringan media yang kurang bagus, karena medan

yang ditempuh masih sangat terbatas dari segi fasilitas yang dimiliki humas Pemerintah Kabupaten Kuansing. Sehingga pihak Pemerintah mencari solusi untuk bisa mengatasi permasalahan ini dan bisa berkomunikasi dengan baik dan lancar.

Tentunya sebagai masyarakat butuh pelayanan optimal, jika ada kekurangan dari instansi terkait, maka diberikan masukan dan untuk perbaikan kedepannya sehingga apa yang dibutuhkan semua pihak dapat terlayani dengan baik. Tingginya kinerja PNS dapat membantu program Pemerintah sebagaimana yang diharapkan adalah PNS yang siap bekerja.

Kondisi ini sangat dipandang serius oleh pihak humas Kuansing serta dilakukan langkah yang tepat untuk melalui kegiatan *good governance* ini. Artinya, suatu program yang direncanakan dengan baik, belum tentu bisa berhasil dan mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan, sehingga sosialisasi atau penyebaran informasi mengenai program ini dapat dilakukan dengan menerapkan manajemen humas, yaitu merencanakan cara atau gagasan konsep apa yang dilakukan dalam menyampaikan pesan dalam hal kegiatan *good governance*.

Humas di pemerintahan kabupaten kuantan singingi sangat berperan besar dalam melaksanakan tugasnya. Dimana, segala pihak yang bersangkutan juga berpengaruh didalamnya, begitu juga Kabag Humas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sendiri, bahwa ia mempunyai tanggung jawab besar dalam program manajemen sendiri. Menyangkut kegiatan manajemen humas di lingkup Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, humas telah mempersiapkan segala yang diperlukan. Baik kegiatan itu dilakukan melalui media, maupun secara kemasyarakatannya.

Humas pemerintah adalah aktifitas lembaga yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik

pemangku kepentingan dan atau sebaliknya. Peran Humas Pemerintah sebagai komunikator, fasilitator dan desiminotor.

1. Humas komunikator yaitu, Humas pemerintah berperan membuka akses saluran dan komunikasi dua arah, antara instansi pemerintah dan publiknya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Peran Humas sebagai fasilitator, Humas pemerintah berperan menerapkan perkembangan situasi dan aspirasi publik untuk di jadikan masukan bagi pimpinan instansi pemerintah dalam pengambilan putusan.
3. Desiminotor, Humas pemerintah berperan dalam pelayanan informasi terhadap internal organisasi dan publiknya, baik langsung mau pun tidak langsung, mengenai kebijakan dan kegiatan masing-masing instansi pemerintah.⁶

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas maka penulis mengangkat judul **“Manajemen Humas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mendukung Terciptanya *Good Governance*”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran terhadap istilah dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah sebagai berikut :

1. Manajemen

George Terry mendefinisikan manajemen sebagai *“Management is distinct process consisting of palnning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objectives bye the use of human being ang other resource ”*.(Maksudnya Manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan

⁶ Nawawi, M.Si. Prof. Dr. H. Zaidan, Manajemen Pemerintahan (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2013)

pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusiadan lainnya).”⁷

2. Humas

Humas adalah seni menciptakan pengertian publik yang baik sehingga dapat memperdalam suatu individu/organisasi. Humas merupakan terjemahan istilah Bahasa Inggris, *Public Relations* (sering disingkat PR).⁸

3. Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara *administrative* menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal dan *politican framework* bagi tubuhnya aktivitas usaha.⁹

4. Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu kabupaten di provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten kuansing disebut pula dengan rantau Kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau (Rantau nan Tigo Jurai). Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa Minangkabau. Kabupaten ini berada di bagian barat daya Provinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu.¹⁰

⁷ Inu Kencana Syafei, ILMU PEMERINTAHAN (Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2013), 126

⁸ <http://humas-publicrelations.blogspot.co.id/2013/10/humas-hubungan-masyarakat.html/m=1>(diakses 6 Desember 2016)

⁹ <https://yanwariyanidwi.wordpress.com/2015/12/15/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia/>(diakses 6 Desember 2016)

¹⁰ Dt. B. Nurdin Yakub, Minangkabau Tanah Pusaka : Sejarah Minangkabau, Volume 1, 1987

C. Rumusan Masalah

Bagaimana Manajemen Humas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mendukung Terciptanya *Good Governance*?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Manajemen Humas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mendukung Terciptanya *Good Governance*.

2. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

- a. Sebagai langkah awal peneliti untuk dapat mengembangkan teori-teori yang telah dipelajari pada ilmu komunikasi khususnya bidang kehumasan.
- b. Untuk menambah Ilmu Pengetahuan dan wawasan di bidang Pemerintahan.
- c. Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain dalam rangka pengembangan dan memperkaya kajian Ilmu Komunikasi lebih lanjut.

2. Secara Praktis

- a. Agar dapat memberikan kontribusi positif kepada Humas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Peneliti dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan serta menambah wawasan peneliti dalam dunia praktisi humas.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, penegasan istilah, rumusan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Menjelaskan tentang kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Menjelaskan tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu Humas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang hasil penelitiandan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang bermanfaat dari hasil penelitian.

KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN